



RENCANA KERJA

INSPEKTORAT DAERAH

TAHUN 2019

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
2018



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Dharma Praja No. 4 Kelurahan Gunung Tinggi, Telp./Fax (0518) 6076022
Kec. Batulucun, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 72171
Website : inspektorat.tanahbumbukab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR : 700.9.3/ 01350/SET-PERENC/ID

TENTANG

RENCANA KERJA INSPEKTORAT DEARAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2019

INSPEKTUR KABUPATEN TANAH BUMBU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Inspektorat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Inspektorat Daerah tentang Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4565);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 tambahan lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1608);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
25. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
26. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 9);
27. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019.**

KESATU : Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, yang selanjutnya disebut Renja Inspektorat Daerah adalah dokumen perencanaan Inspektorat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

KEDUA : Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berisi:

Bab I Pendahuluan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu

Bab III Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah

Bab V Penutup.

KETIGA : Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batulicin

Pada tanggal : 27 Juli 2018

st **Pt. INSPEKTUR** 

Dr. H. Ambo Sakka, M. Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19651231 199203 1 034

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada akhirnya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 dapat disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 ini pada hakikatnya merupakan perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Untuk meningkatkan daya guna laporan dan peningkatan kinerja, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu secara bertahap berupaya untuk mengembangkan kualitas implementasi pelaporan kinerja dengan memperhatikan kriteria komponen-komponen perencanaan, memanfaatkan sistem pengukuran kinerja untuk monitoring kegiatan dan meningkatkan mutu informasi dalam laporan kinerja.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait, khususnya Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerjanya.

Batulicin, 24 Juli 2018

Plt. INSPEKTUR



Dr. H. Ambo Sakka, M. Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 199203 1 034

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan hukum.....	2
1.3. Maksud dan tujuan	4
1.4. Sistematika penulisan.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH.....	6
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat Daerah	6
2.2. Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Daerah	12
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.....	15
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD	16
2.5. Penelaah usulan program dan kegiatan masyarakat	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH	24
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional.....	24
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah.....	24
3.3. Program dan Kegiatan	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH.....	32
BAB V PENUTUP	34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah dan pencapaian Renstra Inspektorat Daerah s.d Tahun berjalan	7
Tabel 2.2	Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah	14
Tabel 2.3	Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Tanah Bumbu	17
Tabel 2.4	Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2019	23
Tabel 3.1	Rumusan rencana program dan kegiatan Inspektorat Daerah tahun 2019 dan prakiraan maju tahun 2020	28
Tabel 4.1	Rencana kerja dan pendanaan Inspektorat Daerah Tahun 2019	32

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu merupakan suatu tahapan Operasionalisasi dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2016-2021 sebagaimana telah disusun sebelumnya. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2019 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam rencana strategis dapat tercapai dengan baik.

Selain itu dengan disusunnya Rencana Kerja ini diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru di lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu.

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Renja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra yang mencakup periode tahunan. Renja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Target kinerja tahunan di dalam Renja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi perangkat daerah untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Renja SKPD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu Renja Tahun 2019 Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu perlu disusun sebagai dasar penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kinerja pada tahun 2018. Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu disusun berpatokan pada RKPD Kabupaten Tanah Bumbu dan Renstra Inspektorat daerah yang telah disusun sebelumnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 ini yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4565);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 tambahan lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1608);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
25. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
26. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 9).
27. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 35).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan periode 1 (satu) tahun dan menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran serta sebagai wadah sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD Kabupaten Tanah Bumbu dengan mengutamakan isu-isu strategis tahun 2019. Sedangkan tujuan penyusunan Renja ini adalah :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Daerah dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan;
2. Sebagai standar baku penjabaran tupoksi Inspektorat Daerah, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;
3. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan perangkat daerah;
4. Sebagai acuan pimpinan dan semua staf Inspektorat Daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen, demi terwujudnya optimalisasi tugas-tugas Inspektorat Daerah;
5. Agar Inspektorat Daerah mampu berperan sebagai fasilitator (mitra) bagi unit-unit kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih,

bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II**HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah.**

Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk Tahun 2017 pada umumnya realisasi program/kegiatan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang sudah ditetapkan dan telah mengacu pada APBD Kabupaten Tanah Bumbu.

Pada Tahun Anggaran 2017 ada 2 program dan 17 kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan Laporan Kemajuan Kegiatan Tahun Anggaran 2017, kinerja keluaran (*output*) pelaksanaan 2 program/ 17 kegiatan Inspektorat Daerah mencapai 98,72%. Dari semua kegiatan hanya satu kegiatan yang tidak terealisasi 100% target kinerjanya yaitu kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS. Hal ini disebabkan karena adanya kelebihan anggaran honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak satu orang dan adanya satu orang PTT yang mutasi keluar dari Inspektorat Daerah.

Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu Tahun 2018 dapat diperkirakan bahwa pelaksanaan program/kegiatan akan sesuai dengan target yang direncanakan. Pencapaian kinerja Tahun 2017 serta perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2018 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target kinerja dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2016-2021, dikarenakan Renja 2018 masih dalam tahun berjalan. Untuk lebih jelasnya uraian mengenai evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2017 dan Capaian Renstra akan disajikan dalam table 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan (2018)
Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD tahun (n-1) 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2017	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan									
4.02.4.02	Pengawasan									
4.02.4.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
4.02.4.02.01.01.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening listrik, air, dan telpon	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60%
4.02.4.02.01.01.06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpelihara	67 Unit	10 Unit	13 Unit	13 Unit	100%	14 Unit	37 Unit	55%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD tahun (n-1) 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2017	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60%
4.02 . 4.02.01 . 01 . 08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor	1,053 Item	222 Item	170 Item	170 Item	100%	221 Item	613 Item	58%
4.02 . 4.02.01 . 01 . 09	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja*	Tersedianya Peralatan Kantor yang siap pakai	141 Unit	16 Unit	13 Unit	13 Unit	100%	36 Unit	65 Unit	46%
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	10,092 Item	1,234 Item	1,093 Item	1,093 Item	100%	2,514 Item	4,841 Item	48%
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	34,615 Item	2,130 Item	1,880 Item	1,880 Item	100%	10,155 Item	14,165 Item	41%
4.02 . 4.02.01 . 01 . 12	Kegiatan Penyediaan Komponen listrik / Penerangan Bangunan kantor	Tersedianya alat listrik kantor	208 Item	26 Item	36 Item	36 Item	100%	46 Item	108 Item	52%
4.02 . 4.02.01 . 01 . 13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	131 Unit	13 Unit	- Unit	- Unit	0%	43 Unit	56 Unit	43%
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terbayarnya tagihan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	96 eks/thn	- eks/thn	24 eks/thn	24 eks/thn	100%	24 eks/thn	48 eks/thn	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD tahun (n-1) 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2017	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02 . 4.02.01 . 01 . 16	Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	36 Bulan	- Bulan	- Bulan	- Bulan	0%	12 Bulan	12 Bulan	33%
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi	5,398 Kotak	538 Kotak	520 Kotak	520 Kotak	100%	1,390 Kotak	2,448 Kotak	45%
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	406 Ok	86 Ok	22 Ok	22 Ok	100%	98 Ok	206 Ok	51%
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga non PNS	Tersedianya jasa tenaga non PNS	836 OB	151 OB	169 OB	153 OB	91%	163 OB	467 OB	56%
4.02 . 4.02.01 . 01 . 22	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah*	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah	648 Ok	- Ok	- Ok	- Ok	0%	148 Ok	148 Ok	23%
4.02 . 4.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	- %	- %	0%	100 %	100 %	100%
4.02 . 4.02.01 . 02. 03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terbangun	2 Unit	- Unit	- Unit	- Unit	0%	- Unit	- Unit	0%
4.02 . 4.02.01 . 02. 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya kendaraan Dinas Operasional	2 Unit	- Unit	- Unit	- Unit	0%	- Unit	- Unit	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD tahun (n-1) 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2017	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02 . 4.02.01 . 02. 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor*	Gedung kantor yang terpelihara	2 Unit	- Unit	- Unit	- Unit	0%	- Unit	- Unit	0%
4.02 . 4.02.01 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam penggunaan atribut pegawai	100 %	100 %	- %	- %	0%	- %	100 %	100%
4.02 . 4.02.01 . 03. 05	Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	150 Stel	55 Stel	- Stel	- Stel	0%	- Stel	55 Stel	37%
4.02 . 4.02.01 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase SKPD dan Desa yang tidak terdapat temuan penyimpangan	90 %	70 %	75 %	75 %	0%	80 %	80 %	80%
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Jumlah laporan hasil pengawasan internal	835 Laporan	143 Laporan	102 Laporan	102 Laporan	100%	150 Laporan	395 Laporan	47%
4.02 . 4.02.01 . 20 . 02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah kasus pengaduan yang ditangani	17 Kasus	6 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	100%	4 Kasus	12 Kasus	71%
4.02 . 4.02.01 . 20 . 06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	162 Temuan	30 Temuan	36 Temuan	36 Temuan	100%	34 Temuan	100 Temuan	62%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD tahun (n-1) 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2017	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02 . 4.02.01 . 20 . 07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah peserta koordinasi/sosialisasi/bimtek	10.211 Orang	4.289 Orang	4.282 Orang	4.282 Orang	100%	480 Orang	9.051 Orang	89%
4.02 . 4.02.01 . 20 . 08	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Pemutakhiran data SKPD seluruh Kab/Kota di Provinsi Kalsel	13 Kab/ Kota	- Kab/ Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	100%	- Kab/ Kota	13 Kab/ Kota	100%
4.02 . 4.02.01 . 21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase Aparatur Pengawas yang memiliki sertifikat	100 %	100 %	- -	- -	0%	100 %	100 %	100%
4.02 . 4.02.01 . 21 . 01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah tenaga pengawas yang mengikuti diklat dan Bimtek	174 Org	44 Org	- -	- -	0%	48 Org	92 Org	53%
4.02 . 4.02.01 . 21 . 04	Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas	Jumlah tenaga pengawas yang di nilai	52 Org	- -	- -	- -	0%	17 Org	17 Org	33%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah unsur pendukung tugas Bupati di bidang pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan.

Dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Inspektorat Daerah, Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Adapun Unsur-unsur organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari Sekretariat dengan 3 Kasubag, Inspektur Pembantu sebanyak 4 unit dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai dengan tupoksinya, pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu didominasi oleh penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan. Perpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

1. Jumlah SKPD yang menerapkan Zona Integritas
2. Persentase SKPD yang mendapat nilai SAKIP minimal B
3. Menurunnya persentase SKPD dan Desa yang memiliki temuan kerugian negara
4. Menurunnya persentase jumlah kerugian negara
5. Tingkat capaian kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU), Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) bidang pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yaitu Persentase tindak lanjut temuan dan Jumlah temuan BPK.

Pelaksanaan indikator kinerja ini tentu harus dapat diukur realisasi kinerjanya. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan

dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Adapun capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan Tahun 2017 dapat ditampilkan dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Jumlah SKPD yang menerapkan Zona Integritas			0	0	0	1	2	0	0	0	1	
2	Persentase SKPD yang mendapat nilai SAKIP minimal B			16%	75%	87%	90%	100%	16%	75%	87%	90%	
3	Menurunnya persentase SKPD dan Desa yang memiliki temuan kerugian negara			15%	7%	10%	6%	5%	15%	7%	10%	6%	
4	Menurunnya persentase jumlah kerugian negara			0.037%	0.001%	0.004%	0,003%	0,002%	0.037%	0.001%	0.004%	0,003%	
5	Tingkat capaian kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)			Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	
6			Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal dengan kategori tuntas (selesai) ditindaklanjuti	83%	84%	85%	86%	87%	83%	84%	85%	86%	
7			Jumlah temuan BPK	10 Temuan	8 Temuan	7 Temuan	6 Temuan	5 Temuan	10 Temuan	8 Temuan	7 Temuan	6 Temuan	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugas di bidang pengawasan mempunyai fungsi yaitu merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati, menyusun laporan hasil pengawasan, melaksanakan administrasi Inspektorat dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan pencapaian tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Masih belum efektifnya dampak pemeriksaan;
2. Masih kurangnya jumlah tenaga pengawas yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah;
3. Kualitas tenaga pengawas Inspektorat Daerah yang rata-rata masih ada pada level 2;
4. Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan yang masih belum memenuhi Standar Pemeriksaan;
5. Perangkat Daerah masih tidak fokus terhadap tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
6. Temuan yang berulang (seperti proses perencanaan dan penganggaran, administrasi barang milik daerah);
7. Norma, standar dan prosedur pemeriksaan belum sepenuhnya tersedia;
8. Peraturan Bupati yang ada, belum sepenuhnya mengatur SOP secara lengkap tentang tata cara pemeriksaan;
9. Kesenjangan antara bimbingan teknis dan kebutuhan.

Sejumlah kendala diatas akan menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan tahun anggaran berikutnya sehingga dapat dicapai kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, disamping kendala, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai peluang dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

1. Adanya dukungan kebijakan dalam bidang pengawasan dari Bupati Tanah Bumbu;
2. Adanya dukungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Pusdiklatwas BPKP serta lembaga lain yang berkompeten dalam bidang pengawasan;
3. Adanya semangat Pemerintah Daerah untuk memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
4. Adanya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
5. Adanya komitmen Pemerintah Daerah tentang pemerintahan yang baik.

Sedangkan tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

1. Adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Pengawasan dan Pemerintah Daerah pada umumnya.
2. Kurangnya tanggapan objek pemeriksaan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
3. Semakin pesatnya perkembangan sistem dan prosedur baru pada pengelolaan keuangan maupun kinerja SKPD.

Tantangan dan peluang tersebut harus dijadikan acuan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih baik demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Tanah Bumbu.

Adapun isu penting strategis yang patut diangkat dalam Renja ini dan perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah:

- a) Peningkatan kapabilitas APIP menuju Level 3.
- b) Peningkatan maturitas implementasi SPIP menjadi Level 3.
- c) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.
- d) Pelaksanaan pemeriksaan khusus sesuai dengan laporan masyarakat.
- e) Pendidikan dan Pelatihan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- f) Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara dan ASN.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dibandingkan dengan rancangan awal RKPD Tahun 2019, maka Renja Tahun 2019 relatif tidak ada perbedaan mendasar dalam susunan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pembandingan antara Rancangan awal RKPD dengan Renja menjadi penting mengingat RKPD selanjutnya menjadi patokan dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan demikian amat penting untuk menyusun Renja SKPD dengan mengacu pada program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama demi kemudahan administrasi, sinkronisasi dan keselarasan antar Renja SKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Adapun review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019 dapat ditunjukkan pada Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100 %	1,392,329,000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100 %	1,392,329,000	
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Terbayarnya rekening listrik, air, dan telpon	12 Bulan	53,880,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Terbayarnya rekening listrik, air, dan telpon	12 Bulan	53,880,000	
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpelihara	14 Unit	30,100,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpelihara	14 Unit	30,100,000	
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	210,000,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	210,000,000	
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor	220 Item	4,800,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor	220 Item	4,800,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja*	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Tersedianya Peralatan Kantor yang siap pakai	38 Unit	28,875,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja*	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Tersedianya Peralatan Kantor yang siap pakai	38 Unit	28,875,000	
6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Tersedianya alat tulis kantor	2,550 Item	54,990,000	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Tersedianya alat tulis kantor	2,550 Item	54,990,000	
7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	10,200 Item	5,224,000	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	10,200 Item	5,224,000	
8	Kegiatan Penyediaan Komponen listrik / Penerangan Bangunan kantor	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Tersedianya alat listrik kantor	50 Item	2,350,000	Kegiatan Penyediaan Komponen listrik / Penerangan Bangunan kantor	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Tersedianya alat listrik kantor	50 Item	2,350,000	
9	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40 Unit	47,500,000	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40 Unit	47,500,000	
10	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Terbayarnya tagihan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24 eks/ thn	2,160,000.00	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Terbayarnya tagihan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24 eks/ thn	2,160,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12,000,000	Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12,000,000	
12	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi	1,450 Kotak	37,920,000	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi	1,450 Kotak	37,920,000	
13	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 Ok	527,205,000	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 Ok	527,205,000	
14	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga non PNS	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Tersedianya jasa tenaga non PNS	170 OB	330,325,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga non PNS	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Tersedianya jasa tenaga non PNS	170 OB	330,325,000	
15	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah*	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah	250 Ok	45,000,000	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah*	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah	250 Ok	45,000,000	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	100 %	695,000,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	100 %	925,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembangunan gedung kantor	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah gedung kantor yang terbangun	1 Unit	200,000,000	Pembangunan gedung kantor	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah gedung kantor yang terbangun	1 Unit	200,000,000	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Tersedianya kendaraan Dinas Operasional	1 Unit	525,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Tersedianya kendaraan Dinas Operasional	1 Unit	525,000,000	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor*	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Gedung kantor yang terpelihara	1 Unit	200,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor*	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Gedung kantor yang terpelihara	1 Unit	200,000,000	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam penggunaan atribut pegawai	100 %	12,500,000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam penggunaan atribut pegawai	100 %	12,500,000	
1	Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	50 Stel	12,500,000	Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	50 Stel	12,500,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase SKPD dan Desa yang tidak terdapat temuan penyimpangan	85 %	1,799,100,000	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase SKPD dan Desa yang tidak terdapat temuan penyimpangan	85 %	1,799,100,000	
1	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah laporan hasil pengawasan internal	200 Laporan	1,550,000,000	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah laporan hasil pengawasan internal	200 Laporan	1,550,000,000	
2	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah kasus pengaduan yang ditangani	3 Kasus	66,600,000	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah kasus pengaduan yang ditangani	3 Kasus	66,600,000	
3	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	32 Temuan	105,000,000	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	32 Temuan	105,000,000	
4	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah peserta koordinasi/sosialisasi/bimtek	400 Orang	77,500,000	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah peserta koordinasi/sosialisasi/bimtek	400 Orang	77,500,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase Aparatur Pengawas yang memiliki sertifikat	100 %	340,750,000	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase Aparatur Pengawas yang memiliki sertifikat	100 %	340,750,000	
1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah tenaga pengawas yang mengikuti diklat dan Bimtek	41 Org	325,000,000	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah tenaga pengawas yang mengikuti diklat dan Bimtek	41 Org	325,000,000	
2	Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah tenaga pengawas yang di nilai	17 Org	15,750,000	Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah tenaga pengawas yang di nilai	17 Org	15,750,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM, serta Organisasi Lainnya. Oleh karena itu sampai dengan saat ini Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu belum pernah mendapat usulan program atau kegiatan dari para stakeholders.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2019
Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan tugas pokok, dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagaimana yang ada dalam RPJMN Tahun 2015-2019 yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 terdapat misi Provinsi Kalimantan Selatan yang juga berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Selain itu juga dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 pada misi kelima rumusan kebijakan yang ada yaitu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang baik, efektif dan bersih. Oleh karena itu program dan kegiatan yang direncanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu akan mendukung keberhasilan program RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki.

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.

Visi Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu adalah *"Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai poros maritim utama serta pusat perdagangan, industri, dan pariwisata di Kalimantan berbasis pada keunggulan lokal dan potensi strategis daerah menuju Tanah Bumbu yang maju, sejahtera dan berintelektual tinggi"*. Sejalan dengan visi dimaksud, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah satu elemen dari sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan harus mampu merespon dan bersinergi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tanah Bumbu.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah

Untuk dapat mendukung keberhasilan tercapainya visi Kabupaten Tanah Bumbu yang telah ditetapkan, perlu ditetapkan tujuan Inspektorat Daerah yang merupakan capaian yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dan sasaran yang merupakan capaian yang ingin dicapai setiap tahunnya. Sebagai penjabaran dari visi Kabupaten Tanah Bumbu yang lebih spesifik dan terukur dalam upaya mewujudkannya, maka tujuan yang akan dicapai Inspektorat Daerah untuk lima tahun ke depan adalah *"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan melalui pembinaan dan"*

pengawasan Intern yang profesional berdasarkan Standar, norma, dan kode etik pengawasan, serta melindungi kekayaan daerah dari setiap upaya penyimpangan”.

Untuk mendapat hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu satu tahunan maka Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu menjabarkannya dalam suatu sasaran. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing.

Untuk mencapai tujuan di atas, maka sasaran yang akan dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya zona integritas di SKPD, dengan indikator Jumlah SKPD yang menerapkan Zona Integritas. Target kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2019 adalah satu SKPD yang dapat menerapkan Zona Integritas.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD, dengan indikator Persentase SKPD yang mendapat nilai SAKIP minimal B. Target kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2019 adalah 90%.
3. Meningkatnya sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan indikator:
 - a. Menurunnya persentase SKPD dan Desa yang memiliki temuan kerugian negara. Target kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2019 adalah 6%.
 - b. Menurunnya persentase jumlah kerugian Negara. Target kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2019 adalah 0,003%.
4. Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan Internal dan Eksternal yang diselesaikan, dengan indikator Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal dengan kategori tuntas (selesai) ditindaklanjuti. Target kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2019 adalah 86%.
5. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dengan indikator Tingkat capaian kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah). Target kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2019 adalah Level 3.

3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditentukan sebagai arah dari strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja perangkat daerah. Sedangkan kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah dalam merealisasikan program kerja yang ditetapkan.

Program kerja dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ini disusun juga dengan memperhatikan visi dan misi kepala daerah, di mana salah satu misi yang akan menunjang terwujudnya visi Kabupaten Tanah Bumbu tersebut yaitu: *“Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih”*. Berkaitan dengan hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu membantu Kepala Daerah dengan melakukan pengawasan dan pembinaan pada seluruh SKPD dan Pemerintah Desa se-Kabupaten Tanah

Bumbu agar dalam menjalankan tugas-tugasnya selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang direncanakan dalam upaya pencapaian target kinerja pada tahun 2019 menetapkan 5 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 25 kegiatan sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, terdiri atas kegiatan :

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
- c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- f. Penyediaan alat tulis kantor
- g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- h. Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor
- i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- k. Penyediaan Bahan Logistik kantor
- l. Penyediaan Makanan dan Minuman
- m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- n. Penyediaan jasa tenaga non PNS
- o. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pembangunan gedung kantor.
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional.
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor*

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu.

4. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

- a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.
- b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah.
- c. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan.
- d. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif.

5. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawas

- a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawas.
- b. Pembinaan jabatan fungsional pengawas.

Agar lebih memudahkan dalam menganalisa Program dan Kegiatan serta besaran perkiraan kebutuhan anggarannya, berikut ditampilkan table 3.1 mengenai Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 dan perkiraan maju tahun 2020:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kineja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4 . 02	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan								
4.02 . 4.02	Pengawasan								
4.02 . 4.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Inspektorat Daerah	100 %	1,392,329,000	APBD		100 %	1,494,831,700
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening listrik, air, dan telpon	Inspektorat Daerah	12 Bulan	53,880,000	APBD		12 Bulan	59,402,700
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpelihara	Inspektorat Daerah	14 Unit	30,100,000	APBD		16 Unit	34,839,000
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Inspektorat Daerah	12 Bulan	210,000,000	APBD		12 Bulan	220,000,000
4.02 . 4.02.01 . 01 . 08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor	Inspektorat Daerah	220 Item	4,800,000	APBD		220 Item	5,100,000
4.02 . 4.02.01 . 01 . 09	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja*	Tersedianya Peralatan Kantor yang siap pakai	Inspektorat Daerah	38 Unit	28,875,000	APBD		38 Unit	30,325,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Inspektorat Daerah	2,550 Item	54,990,000	APBD		2,600 Item	57,740,000
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Inspektorat Daerah	10,200 Item	5,224,000	APBD		10,250 Item	5,500,000
4.02 . 4.02.01 . 01 . 12	Kegiatan Penyediaan Komponen listrik / Penerangan Bangunan kantor	Tersedianya alat listrik kantor	Inspektorat Daerah	50 Item	2,350,000	APBD		50 Item	2,350,000
4.02 . 4.02.01 . 01 . 13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Daerah	40 Unit	47,500,000	APBD		35 Unit	77,500,000
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terbayarnya tagihan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Inspektorat Daerah	24 eks/thn	2,160,000	APBD		24 eks/thn	2,275,000
4.02 . 4.02.01 . 01 . 16	Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Daerah	12 Bulan	12,000,000	APBD		12 Bulan	12,500,000
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi	Inspektorat Daerah	1,450 Kotak	37,920,000	APBD		1,500 Kotak	41,850,000
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Inspektorat Daerah	100 Ok	527,205,000	APBD		100 Ok	553,600,000
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga non PNS	Tersedianya jasa tenaga non PNS	Inspektorat Daerah	170 OB	330,325,000	APBD		183 OB	346,850,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02 . 4.02.01 . 01 . 22	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah*	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah	Inspektorat Daerah	250 Ok	45,000,000	APBD		250 Ok	45,000,000
4.02 . 4.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Inspektorat Daerah	100 %	925,000,000	APBD		100 %	925,000,000
4.02 . 4.02.01 . 02. 03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terbangun	Inspektorat Daerah	1 Unit	200,000,000	APBD		1 Unit	200,000,000
4.02 . 4.02.01 . 02. 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya kendaraan Dinas Operasional	Inspektorat Daerah	1 Unit	525,000,000	APBD		1 Unit	525,000,000
4.02 . 4.02.01 . 02. 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor*	Gedung kantor yang terpelihara	Inspektorat Daerah	1 Unit	200,000,000	APBD		1 Unit	200,000,000
4.02 . 4.02.01 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam penggunaan atribut pegawai	Inspektorat Daerah	100 %	12,500,000	APBD		100 %	12,500,000
4.02 . 4.02.01 . 03. 05	Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	Inspektorat Daerah	50 Stel	12,500,000	APBD		50 Stel	12,500,000
4.02 . 4.02.01 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase SKPD dan Desa yang tidak terdapat temuan penyimpangan	Inspektorat Daerah	85 %	1,799,100,000	APBD		90 %	1,869,000,000
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah laporan hasil pengawasan internal	Inspektorat Daerah	200 Laporan	1,550,000,000	APBD		240 Laporan	1,627,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02 . 4.02.01 . 20 . 02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah kasus pengaduan yang ditangani	Inspektorat Daerah	3 Kasus	66,600,000	APBD		2 Kasus	60,500,000
4.02 . 4.02.01 . 20 . 06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	Inspektorat Daerah	32 Temuan	105,000,000	APBD		30 Temuan	100,500,000
4.02 . 4.02.01 . 20 . 07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah peserta koordinasi/sosialisasi/bimtek	Inspektorat Daerah	400 Orang	77,500,000	APBD		760 Orang	80,500,000
4.02 . 4.02.01 . 21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase Aparatur Pengawas yang memiliki sertifikat	Inspektorat Daerah	100 %	340,750,000	APBD		100 %	441,500,000
4.02 . 4.02.01 . 21 . 01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah tenaga pengawas yang mengikuti diklat dan Bimtek	Inspektorat Daerah	41 Org	325,000,000	APBD		41 Org	425,000,000
4.02 . 4.02.01 . 21 . 04	Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas	Jumlah tenaga pengawas yang di nilai	Inspektorat Daerah	17 Org	15,750,000	APBD		17 Org	16,500,000

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan program dan kegiatan perangkat daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk Renja Tahun 2019 adalah dapat ditunjukkan pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah
Tahun 2019

Program / Kegiatan	Anggaran	Sumber Pendanaan
(1)	(2)	(3)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,392,329,000.00	APBD Kab. Tanah Bumbu
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53,880,000.00	APBD Kab. Tanah Bumbu
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	30,100,000.00	APBD Kab. Tanah Bumbu
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	210,000,000.00	APBD Kab. Tanah Bumbu
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4,800,000.00	APBD Kab. Tanah Bumbu
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja*	28,875,000.00	APBD Kab. Tanah Bumbu
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	54,990,000.00	APBD Kab. Tanah Bumbu
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	5,224,000.00	APBD Kab. Tanah Bumbu
Kegiatan Penyediaan Komponen listrik / Penerangan Bangunan kantor	2,350,000.00	APBD Kab. Tanah Bumbu
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	47,500,000.00	APBD Kab. Tanah Bumbu
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2,160,000.00	APBD Kab. Tanah Bumbu
Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	12,000,000.00	APBD Kab. Tanah Bumbu
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	37,920,000.00	APBD Kab. Tanah Bumbu
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*	527,205,000.00	APBD Kab. Tanah Bumbu
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga non PNS	330,325,000.00	APBD Kab. Tanah Bumbu
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah*	45,000,000.00	APBD Kab. Tanah Bumbu
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	925,000,000.00	APBD Kab. Tanah Bumbu
Pembangunan gedung kantor	200,000,000.00	APBD Kab. Tanah Bumbu
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	525,000,000.00	APBD Kab. Tanah Bumbu

Program / Kegiatan	Anggaran	Sumber Pendanaan
(1)	(2)	(3)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor*	200,000,000.00	APBD Kab. Tanah Bumbu
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	12,500,000.00	APBD Kab. Tanah Bumbu
Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	12,500,000.00	APBD Kab. Tanah Bumbu
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1,799,100,000.00	APBD Kab. Tanah Bumbu
Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	1,550,000,000.00	APBD Kab. Tanah Bumbu
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	66,600,000.00	APBD Kab. Tanah Bumbu
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	105,000,000.00	APBD Kab. Tanah Bumbu
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	77,500,000.00	APBD Kab. Tanah Bumbu
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	340,750,000.00	APBD Kab. Tanah Bumbu
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	325,000,000.00	APBD Kab. Tanah Bumbu
Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas	15,750,000.00	APBD Kab. Tanah Bumbu

BAB V

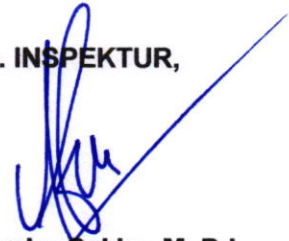
PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 ini disusun sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Periode 2016-2021. Dalam Rencana Kerja Tahun 2019 ini tidak hanya berkaitan dengan langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga pengguna berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Rencana Kerja tahun 2019 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2019. Adapun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat.

Selain itu dukungan maupun *Political Will* dari pemerintah daerah dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu pada umumnya.

Pit. INSPEKTUR,



Dr. H. Ambo Sakka, M. Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 199203 1 034